



INIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2023



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

Jalan Bukit Hibul Timur Nomor 074 Telp. (0532) 2071013 Fax. (0532) 2071012
Email: bkd.lamandau@gmail.com
Nanga Bulik 74612



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Bukit Hibul Timur No. 074 Nanga Bulik Kode Pos :
74162 Telepon (0532) 2071013 Faxsimile (0532) 2071012
e-mail : bkdkab.lamandau@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

NOMOR : 050/ 006.b /BPKPD.A1/I/2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018-2023**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur Capaian Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau, maka diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
- b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud pada huruf (a) maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 –

2023) (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 245);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 839).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG INDIKATOR INDIVIDU (IKI) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 – 2023.**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Individu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud di dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

- a. Memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;

KETIGA : Indikator Kinerja Individu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
- c. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 3 Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamandau,



NORITA INDAYANIE, S.E., M.A.P.

Pembina Tingkat I

NIP. 197705192003122007

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**
2. Tugas : Kepala Badan bertugas memimpin, membina, membimbing, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana serta merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, mengembangkan pendapatan, pengelolaan keuangan Daerah, pelaksanaan pemungutan pajak Daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan Daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Lamandau.
3. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN / KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Dan Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (misi ke-1)	Opini BPK	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah	BPKPD Kab. Lamandau
Meningkatnya Kemandirian Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan (misi-3)	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	BPKPD Kab. Lamandau

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA BIDANG PBB DAN BPHTB**
2. Tugas : Membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan pemungutan pajak Daerah dari sektor PBB dan BPHTB sesuai kewenangan Daerah.
3. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN / KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkat Persentase Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	BPKPD Kab. Lamandau

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA BIDANG PENDAPATAN DAERAH LAINYA (PDL)**
2. Tugas : Membantu kepala badan dalam pelaksanaan pemungutan pajak Daerah, yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, dan pajak air tanah serta pengelolaan dana transfer.
3. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN / KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkat Persentase Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	BPKPD Kab. Lamandau

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN**
2. Tugas : Melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja dan pengelolaan kas Daerah, serta pemrosesan, penerbitan, pengujian dan pendistribusian SP2D dan pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja PPKD.
3. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN / KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Dan Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Penyerapan Belanja di luar Belanja PPKD	$\frac{\text{Jumlah OPD}}{\text{Penerbitan SP2D Tepat Waktu \& Akurat}} \times 100$	BPKPD Kab. Lamandau

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA BIDANG AKUTANSI**
2. Tugas : Pelaksanaan pencatatan dan penatausahaan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah, pelaksanaan akuntansi keuangan Daerah, mengembangkan sistem akuntansi, penyiapan laporan keuangan dan menyajikan informasi keuangan Daerah.
3. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN / KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Dan Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menyampaikan laporan tepat waktu dan terverifikasi	$\frac{\text{Jumlah OPD}}{\text{Verifikasi SPJ Tepat Waktu}} \times 100$	BPKPD Kab. Lamandau

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGGARAN**
2. Tugas : Merumuskan kebijakan sistem penganggaran, penerapan sistem aplikasi penganggaran, penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, penyusunan pedoman pelaksanaan APBD, pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan APBD dan merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah.

3. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN / KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Dan Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menyelesaikan penyusunan anggaran tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah OPD}}{\text{Penyusunan RKA yang Tepat Waktu}} \times 100$	BPKPD Kab. Lamandau

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA BIDANG ASET**
2. Tugas : Merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik Daerah
3. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN / KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Dan Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang Menyampaikan Laporan Aset	$\frac{\text{Jumlah OPD}}{\text{Pelaporan Aset Tepat Waktu}} \times 100$	BPKPD Kab. Lamandau

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PBB & BPHTB**
2. Tugas : Membantu kepala bidang PBB dan BPHTB dalam pelaksanaan pengelolaan pendaftaran dan pendataan PBB dan BPHTB.

2. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN / KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah sebanyak 2 laporan	BPKPD Kab. Lamandau
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terpenuhinya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah sebanyak 2 layanan	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN PBB & BPHTB**
2. Tugas : Membantu kepala bidang PBB dan BPHTB dalam pelaksanaan pengelolaan penetapan dan penagihan PBB dan BPHTB.
3. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN / KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen Ketetapan Wajib Pajak Daerah sebanyak 2 dokumen	BPKPD Kab. Lamandau
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 2 dokumen	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH LAINYA**
2. Tugas : Membantu Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dalam pelaksanaan perhitungan dan penerbitan ketetapan bahan penyusunan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pendataan pajak Daerah lainnya.
3. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN / KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Sebanyak 12 unit	BPKPD Kab.
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebanyak 3 laporan	Lamandau

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN PENAGIHAN DAN PELAPORAN PAJAK DAERAH LAINYA**
2. Tugas : Membantu kepala bidang pajak Daerah lainnya dalam kebijakan teknis dalam pelaksanaan penagihan dan pelaporan pajak Daerah.
3. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN / KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Pemeriksaan Penagihan Pajak Daerah Sebanyak	BPKPD Kab. Lamandau

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PELAKSANAAN ANGGARAN**
2. Tugas : Menyusun, penyiapan pedoman teknis pelaksanaan APBD dan perubahan APBD, penyiapan bahan persetujuan revisi program / kegiatan, penyiapan data dan informasi untuk publikasi, menyimpan dan mengamankan data base dan dokumen APBD, penatausahaan administrasi pelaksanaan APBD.
3. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN / KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunya Regulasi Dan Kebijakan dibidang Anggaran	BPKPD Kab. Lamandau
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan sebanyak 1 dokumen	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN**

2. Tugas : penyusunan pedoman teknis penganggaran, standar biaya umum, penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau rancangan perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD atau perubahan APBD, penyiapan bahan rapat evaluasi rancangan APBD dan penyesuaian hasil evaluasi, penyelesaian DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.

3. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN / KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen KUA dan PPAS	BPKPD Kab. Lamandau
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH**

2. Tugas : Membantu kepala bidang perbendaharaan dalam melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja dan pengelolaan kas Daerah

3. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN / KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen KUA dan PPAS	BPKPD Kab. Lamandau
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Laporan Perbendaharaan	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Pembinaan Akutansi	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PEMBIAYAAN**
2. Tugas : Membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam pelaksanaan pemrosesan, penerbitan, verifikasi dan pendistribusian SP2D dan pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja PPKD.
3. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN / KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D	BPKPD Kab. Lamandau
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebanyak 12 laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebanyak 12 laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil sebanyak 12 laporan	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN**
2. Tugas : Pelaksanaan pembukuan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Daerah.
3. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN / KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan Keuangan Daerah, SKPD, BLUD	BPKPD Kab. Lamandau
	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG VERIFIKASI**
2. Tugas : Pelaksanaan penelitian/ pemeriksaan, konsolidasi dan rekonsiliasi laporan keuangan perangkat Daerah dan kas Daerah.
3. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN / KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BPKPD Kab. Lamandau
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN**
2. Tugas : Merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan terhadap pengadaan barang milik Daerah.
3. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN / KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	BPKPD Kab. Lamandau
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN**
2. Tugas : Merumuskan kebijakan dan pedoman pengelolaan terhadap pengadaan barang milik Daerah.
3. Fungsi :

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN / KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	BPKPD Kab. Lamandau
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamandau,



NORITA INDAYANIE, S.E., M.A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 197705192003122007